



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217
Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : dpkh@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 524/ 259 / 413.114/2024

Lamongan, 8 April 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2024 Dinas
Pernakan & Keswan Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN



SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSI.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199602 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomor 18 Lamongan

Telepon. (0322) 321 030, Fax. (0322)312264

E-Mail : dpkh@lamongankab.go.id


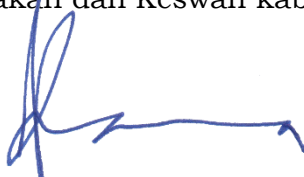

Website : www.lamongankab.go.id/dpkh



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217
Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : dph@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	MR – 01.24
TANGGAL TERBIT	:	08 April 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Peternakan dan Keswan Kab. lamongan</p> <p> ABDUL MANAF D., S.E.Ak., M.S.A. Pembina NIP. 19720503 200604 1 009</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS Dinas Peternakan dan Keswan kab. Lamongan</p> <p> Drh. RAHENDRA PRASETYA E.S. Pembina Tk. I NIP. 19751011 200604 1 011</p>
Disahkan Oleh	:	<p>KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19720420 199602 2 001</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Tabel II.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan 1

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Munculnya Wabah Penyakit Hewan Menular yang Sebelumnya Belum Ada	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan
2	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO 03	Peningkatan Kapasitas Petugas	Koordinasi dengan Intansi Terkait Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
3	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO 04	Validasi Data dan Informasi Tentang Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Unggul	Masih Terdapat Data Yang Kurang Valid	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan
4	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO 06	Koordinasi dengan Pengusul Penerima Bantuan	Tidak Dilakukan Melalui SOP Yang Benar	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Kabid Budidaya	Triwulan 1
5	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO 07	Peningkatan Kompetensi Petugas, Koordinas Antar Instansi, Penyediaan Sarana Prasarana, Pelaksanaan Sesuai SOP, Monitorng/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan.	Ada Kasus/Penyakit Baru Yang Sebelumnya Belum Ada dan Lalu Lintas Hewan Ternak Tinggi.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
6	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO 08	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi Antar Intansi dan KIE Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
7	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO 09	Meningkatkan Kompetensi Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	Manajemen Pelayanan Masih Perlu Perbaikan	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
8	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO 12	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Perubahan Cuaca/Musim yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Hewan	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan	Kabid PPHP	Tiap Triwulan

					Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim		
--	--	--	--	--	---	--	--

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan 1

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
1	Menurunnya Populasi Ternak	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan	Bulan Januari - Maret
2	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Januari – Maret
3	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan	Bulan Januari – Maret
4	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Kabid Budidaya	Triwulan 1	Bulan Pebruari-Maret
5	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Januari – Maret
6	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Januari – Maret
7	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Januari – Maret
8	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kabid PPHP	Tiap Triwulan	Bulan Januari - Maret

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit hewan serta metode perawatan yang tepat bila penyakit hewan terjadi pada ternak.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Namun untuk mengurangi resiko penyakit pada hewan ternak, perlu diintensifkan sosialisasi kepada masyarakat peternak tentang tata cara pencegahan penyakit pada hewan ternak serta perawatan jika resiko penyakit hewan terjadi, serta percepatan program Vaksinasi PMK, sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit hewan serta meminimalisir kematian pada hwan ternak.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan, serta masih adanya ternak sapi yang belum tervaksinasi. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pada penyakit hewan yang sering dijumpai di Kabupaten Lamongan, serta malakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK.